Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia

Protection Of Constitutional Rights In Indonesia

Herdi Munte ^{1)*} & Christo Sumurung Tua Sagala ^{2)*}

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

Diterima: Januari 2021; Disetujui: Desember 2021; Dipublish: Desember 2021

*Corresponding Email: munhard@gmail.com, christosagala125@gmail.com

Abstrak

Dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga Negara. Sebagaimana tujuan utama negara hukum untuk melindungi kebebasan individu warga Negara dari kekuasaan Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan tentang apa yang menjadi hak konstitusional warga negara dan bagaimana perlindungannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari sumber bahan hukum seperti buku, artikel/tulisan dan dokumen lainnya, kemudian data dianalisis sehingga akan memberikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya yang dijamin oleh UUD 1945, untuk upaya perlindungannya melalui proses pembentukan undang-undang yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat dan apabila ada undang-undang yang merugikan haknya dapat mengajukan pengujian konstiusionalitas di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Perlindungan; Hak; Konstitusional.

Abstract

The basis for the establishment of the Constitutional Court is an effort to uphold the principles of a rule of law and to provide maximum protection for democracy and basic rights of citizens. As the main objective of the rule of law is to protect the freedom of individual citizens from the State's power. The purpose of this research is to answer the question of what constitutional rights are citizens and how they are protected in Indonesia. This research uses a normative juridical approach by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations obtained from legal material sources such as books, articles / writings and other documents, then the data is analyzed so that it will provide conclusions. The results show that constitutional rights are rights that include civil rights, political rights, economic rights, and socio-cultural rights guaranteed by the 1945 Constitution, for their protection efforts through the process of forming laws that reflect the protection and respect for human rights and dignity. and dignity and if there is a law that is detrimental to their rights, they can file a constitutionality review in the Constitutional Court.

Keywords: Protection; Rights; Constitutional.

How to Cite: Munte, H. & Sagala, C.S.T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8 (2) 2021 : 183-192

PENDAHULUAN

Konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) bercirikan adanya pembagian kekuasaan (*machten-scheiding*), pemencaran kekuasaan negara (*spreading van de staats-macht*), pengakuan hak asasi manusia, *trias politica*, dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (asas legalitas) (Ence, 2008), yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang diatur berdasarkan Norma, kaidah, dan aturan. Prinsip Negara hukum yang dianut oleh Indonesia dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebelum amandemen UUD 1945, perihal ini hanya dinyatakan dalam penjelasan umumnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).

Rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi, dalam arti menampung prinsip ketatanegaraan sekaligus, yaitu kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat dan kedaulatan parlemen, serta dapat digunakan sebagai dasar pembeda dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung dan juga dasar dilaksanakannya kewenangan atau hak menguji (konstitusional) undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam pemerintahan yang bersistem pemisahan kekuasaan terdapat mekanisme *checks and balances* dari sesama lembaga Negara.

Tujuan utama *rechtsstaat* adalah untuk melindungi kebebasan individu warga Negara dari kekuasaan Negara (Palguna, 2013). Dari tujuan utama *rechtsstaat* itu, Schmitt kemudian merumuskan dua prinsip utama konstitusi yang sesuai dengan tujuan itu, yaitu pertama, prinsip distribusi (*principle of distribution*), dan kedua, prinsip

organisasional (*organizational principle*). Yang dimaksud dengan prinsip distribusi adalah bahwa bidang kebebasan individu itu diperanggapkan sebagai sesuatu yang ada mendahului Negara. Oleh sebab itu, kebebasan individu pada dasarnya tidak dibatasi sedangkan kewenangan Negara untuk campur tangan terhadap kebebasan itu pada dasarnya dibatasi. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip organisasional sebagai prinsip yang memfasilitasi prinsip distribusi adalah bahwa kekuasaan Negara, yang secara prinsip dibatasi itu, disebar dan dicakup dalam suatu sistem pembatasan kekuasaan (Palguna, 2013).

Kelahiran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan lembaga Negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibagian kekuasaan kehakiman. Lahirnya MK tidak terlepas dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Kehakiman yang dimiliki oleh MK *judicial control* dalam rangka sistem *checks and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan (Maruarar Siahaan, 2011). Yang menjadi dasar pembentukan MK adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga Negara.

Melihat dari prinsipnya bahwa tujuan dibentuknya MK salah satunya untuk menjamin hak konstitusional warga negara, sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai apa saja yang menjadi hak konstitusional warga negara di Indonesia dan bagaimana perlindungannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis (Soekanto, 2003). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari perundangan-undangan, putusan hakim, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya (Palguna, 2013). Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi (Purnomosidi, 2017).

Hak konstitusional yang disebut juga dengan Hak asasi manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki dan dilindungi oleh Negara hukum modern serta dimuat dalam konstitusi setiap Negara. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan perlindungan, penegakan, dan penghormatan serta pemajuan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya guna menjamin, mengatur, atau bahkan membatasi “dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (Asshiddiqie, 2008).

Dalam perkembangan kehidupan saat ini hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting yang dianut oleh setiap Negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis bahwa menurut teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*), Negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*). Walaupun konsep Negara hukum *rule of law* dan *rechtsstaat* sama-sama lahir sebagai upaya membatasi dan mengatur kekuasaan, sejarah perkembangannya berbeda. Gagasan Negara hukum yang berkembang dengan istilah *rechtsstaat* dikenal di Jerman (kawasan eropa kontinental) dan *the rule of law* berawal di Inggris (anglo-saxon). Walaupun mempunyai latar belakang sejarah dan sifat yang berbeda, pada dasarnya mengarah pada sasaran yang sama, yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia (Ence, 2008).

Secara teoritis, salah satu syarat bagi suatu Negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia (HAM) (Ibrahim, 1981). HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa, seperti hak hidup, hak selamat, hak kebebasan dan kesamaan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun (Hadjon, 1987).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan secara eksplisit tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia tersebut bangsa Indonesia telah masuk pada era baru terutama dalam menegakkan masyarakat yang demokratis

yang melindungi hak-hak asasi manusia (S, Kaelan, M dan Zubaidi, 2010).

Klasifikasi hak asasi manusia terdiri dari beberapa aspek hak yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Hak sipil adalah hak yang melekat terkait kedudukan sebagai manusia individu dalam kehidupan sosial dan sebagai warga negara, hak ini misalnya adalah hak kebebasan beragama, hak atas hidup, dan hak persamaan dihadapan hukum. Hak politik adalah hak terkait dengan hubungan antara negara dan warga negara serta terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, misalnya kebebasan berserikat dan berkumpul, hak partisipasi dalam pemerintahan, dan hak pilih. Hak ekonomi adalah hak terkait dengan aktivitas ekonomi, antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapatkan upah, dan hak memilih pekerjaan. Hak sosial budaya adalah hak yang lebih bersifat kolektif dalam kehidupan sosial, misalnya hak mengembangkan diri, hak atas pendidikan, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Gaffar, 2016).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) melalui situs web resminya menjelaskan bahwa ada 40 (empat puluh) Hak Konstitusional Warga Negara terbagi dalam 14 (empat belas) rumpun yang dijamin Undang Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut (<https://komnasperempuan.go.id/read-news-40-hak-konstitusional-setiap-warga-negara-indonesia-dalam-14-rumpun>, akses 16 agustus 2020):

1. Hak Atas Kewarganegaraan

- a. Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D (4)
- b. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28D (3)

2. Hak Atas Hidup

- a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A, Pasal 28I (1)
 - b. hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Pasal 28B (2)
3. Hak Untuk Mengembangkan Diri
- a. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Pasal 28C (1)
 - b. Hak atas jaminan sosial memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat Pasal 28H (3)
 - c. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial Pasal 28F
 - d. Hak mendapat pendidikan Pasal 31 (1), Pasal 28C (1)
4. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih
- a. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani Pasal 28I (1)
 - b. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan Pasal 28E (2)
 - c. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Pasal 28E (1), Pasal 29 (2)
 - d. Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, Kewarganegaraan, tempat tinggal Pasal 28E (1)
 - e. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul Pasal 28E (3)
 - f. Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani Pasal 28E (2)
5. Hak Atas Informasi
- a. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Pasal 28F
 - b. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah

- dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Pasal 28F
6. Hak Atas kerja & Penghidupan Layak
 - a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 (2)
 - b. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Pasal 28D (2)
 - c. Hak untuk tidak diperbudak Pasal 28I (1)
 7. Hak Atas Kepemilikan & Perumahan
 - a. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Pasal 28H (4)
 - b. Hak untuk bertempat tinggal Pasal 28H (1)
 8. Hak Atas Kesehatan & Lingkungan Sehat
 - a. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin Pasal 28H (1)
 - b. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasal 28H (1)
 - c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28B (1)
 9. Hak Berkeluarga
 - a. Hak untuk membentuk keluarga Pasal 28B (1)
 10. Hak Atas Kepastian Hukum & Keadilan
 - a. Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D (1)
 - b. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D (1), Pasal 27 (1)
 - c. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Pasal 28 (1)
 11. Hak Bebas Dari Ancaman, Diskriminasi & Kekerasan
 - a. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pasal 28G (1)
 - b. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Pasal 28G (2)
 - c. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28I (2)
 - d. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H (2)
 12. Hak Atas Perlindungan
 - a. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya Pasal 28G (1)
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif Pasal 28I (2)
 - c. Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban Pasal 28I (3)
 - d. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28B (2), Pasal 28I (2)
 - e. Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28G (2)
 13. Hak Memperjuangkan Hak
 - a. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28C (2)
 - b. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 28, Pasal 28E (3)
 14. Hak Atas Pemerintahan
 - a. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D (3), Pasal 27 (1)

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia

Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya dan hak lainnya yang sudah dijamin oleh konstitusi dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu melalui proses pembentukan Undang-Undang dan melalui gugatan Pengadilan Tata Negara di MK (Gaffar, 2016).

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum, karenanya proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh tempat negara itu dibentuk, (Arliman, 2017). Menurut Lawrence M.Friedman sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam nuansa yang demokratis memang sudah sewajarnya pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara demokratis pula dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dari segala golongan terutama kali dari kelompok masyarakat yang lemah, termarginalkan, atau bahkan minoritas pada suatu wilayah dimana peraturan perundang-undangan tersebut akan diterapkan (Munte et al., 2017). Hal ini tentu sejalan dengan tuntutan negara hukum yang awalnya ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak masyarakat (Aryani & Hermanto, 2020).

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia menjadi hal penting yang harus senantiasa dijaga. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya menetapkan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas kemanusiaan. Dalam penjelasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dan kemudian didukung dengan “asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan” yang menerangkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Dengan demikian bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan harus senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Namun harapan agar proses pembentukan undang-undang dapat mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat masih belum terpenuhi, meskipun telah ada jaminan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada praktiknya, ketentuan ini hanya menjadi formalitas guna memenuhi prosedur pembentukan undang-undang. karena undang-undang dibuat oleh organ/lembaga politik yang dapat menjadi politis, dalam pembentukannya kadang terjadi *political bargaining* (tawar menawar) yang bermuara pada kompromi (dapat juga konsensus/ kesepakatan) politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang kurang/mencerminkan kepentingan umum mengakibatkan sering terjadi kontroversi dalam masyarakat atas lahirnya suatu undang-undang di Indonesia (Riskiyono, 2015).

Mengantisipasi hal tersebut, negara melalui konstitusi telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk melindungi

haknya yang dirugikan atas berlakunya undang-undang dengan mekanisme mengajukan gugatan tata negara, untuk pengujian terhadap peraturan tersebut kepada lembaga Negara yang diberikan kewenangannya oleh konstitusi sebuah Negara. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar (UUD) atau Konstitusi, Kelsen menyatakan bahwa UUD menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, sebab itu merupakan landasan bagi sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar merupakan *fundamental law*. Untuk itu Hans Kelsen menunjuk hak menguji sebagai mekanisme *guarantees of the constitution* (Ni'matul Huda, 2017).

MK merupakan pengawal (*guardian*) dan pelindung (*protector*) konstitusi (Undang-Undang Dasar) sebagai hukum dasar tertinggi (*fundamental norm*), maka MK merupakan lembaga peradilan yang tepat sebagai pelindung hak-hak dasar dan hak-hak konstitusional setiap individu warga Negara yang merupakan bagian dari konstitusi tersebut (Sihombing, 2018).

MK melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai bentuk perlindungan hak-hak Konstitusional individu warga Negara. Dengan demikian, fungsi MK adalah melaksanakan *constitutional review*. Sedangkan, *constitutional review* yang merupakan produk sistem pemerintahan modern yang dilandasi oleh gagasan negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*) memiliki dua tugas utama: Pertama, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, *constitutional review* bertugas mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Kedua, yang tidak kalah pentingnya dan

berkait erat dengan tugas pertama itu, adalah untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.

Doktrin kerugian konstitusional yang sering menjadi pertimbangan berisikan lima syarat. Kelima syarat kerugian ini dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu (1) syarat yang merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi; dan (2) syarat yang berisi prosedur penilaian ukuran kerugian konstitusional. Termasuk dalam kelompok pertama yang berisikan unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah (i) ada hak dan/atau kewenangan, dan (ii) ada kerugian yang diderita. Sedangkan kelompok kedua yang berisikan prosedur pengujian kerugiannya adalah (i) bentuk kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial akan terjadi, (ii) adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan UU yang diuji, dan (iii) kerugian tidak akan terjadi bila permohonan dikabulkan (Wicaksono & Nurbaningsih, 2020).

Dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, pihak pembuat undang-undang, yaitu DPR maupun pemerintah yang membuat undang-undang atas dasar hak inisiatifnya, tentu dengan sendirinya akan dipanggil untuk memberi keterangan meskipun boleh jadi pemerintahan telah berganti dan DPR maupun pemerintah mungkin berada dalam posisi yang tidak membela undang-undang tersebut dalam kenyataannya (Siahaan, 2011). Bilamana MK berpendapat bahwa permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dari pemohon beralasan maka amar putusan MK menyatakan permohonan dikabulkan. Sedangkan bila tidak beralasan maka amar putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Terhadap

permohonan yang dikabulkan, MK melakukan pemeriksaan untuk kemudian memutuskan bertentangan atau tidaknya suatu undang-undang, baik karena pembentukan undang-undang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan UUD maupun mengenai materi ayat, pasal dan/atau bagian suatu undang-undang (Pasal 51 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) (Daulay, 2006).

MK merupakan *negative legislator*, lembaga yang kewenangannya menyatakan muatan materi, isi, pasal atau ayat yang terdapat dalam suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Apabila MK menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka sesuai dengan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tugas dari lembaga legislatif yakni DPR yang mempunyai kewenangan merevisi undang-undang tersebut karena lembaga DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai dengan fungsinya sebagai *positive legislator*.

Dalam praktiknya sudah banyak contoh kasus mengenai perlindungan hak konstitusional yang telah diputus oleh MK seperti: pertama, Setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor perkara 97/PUU-XIV/2016, penganut aliran kepercayaan dapat menjadi pemilih dalam pemilihan umum tanpa harus mengadopsi salah satu dari ke-enam agama yang diakui di Indonesia kedua, Keterbukaan ruang kebebasan pemilih dalam memberikan hak politiknya dengan hanya bermodalkan KTP ditegaskan lewat putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) UU dimaksud adalah konstitusional sepanjang mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 yang menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga, dan masih banyak kasus-kasus lainnya.

Dalam hukum acara MK, yang boleh mengajukan permohonan untuk beracara di MK untuk pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 ditentukan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK yang berbunyi:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara.

MK dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasar hak konstitusional pemohon, yaitu: (Asshiddiqie, 2005)

1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan akan atau tidak lagi terjadi.

Hak atau kewenangan yang dirugikan dalam pasal 51 Undang-Undang MK ini haruslah hak dan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak dan kewenangan yang oleh UUD 1945 diberikan kepada pemohon. Meskipun ditentukan batasan hak konstitusional

melalui persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam yurisprudensi putusan *a quo* namun akses terhadap MK dengan variable pemohon yang demikian lebih luas dibanding dengan akses dengan variable permohonan di MK di Negara-negara Eropa Timur yang lebih sempit (Siahaan, 2011).

Diakuinya hak menguji (*judicial review*) di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemberian kewenangan kepada hakim tersebut merupakan penerapan prinsip *checks and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan Negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law*. Sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang telah menjadi salah satu pokok pikiran dalam UUD 1945 pasca perubahan, pengujian konstiusionalitas materi undang-undang telah ditegaskan menjadi kewenangan hakim, yaitu MK (Ence, 2008).

Keberadaan MK berperan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, khususnya dibidang pengujian konstiusional, bahkan diidealkan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal ini sesuai dengan setumpuk kewenangan dan kewajiban yang harus diembannya dalam melaksanakan fungsi peradilan (Ence, 2008). Oleh karena itu, tepatlah jika dikatakan bahwa MK menguji *the constitutionality of legislative law or legislation* (Asshiddiqie, 2010). Menurut Asshiddiqie bahwa MK merupakan lembaga khusus yang dibentuk tersendiri dengan maksud mengadakan pengujian konstiusionalitas (*constitutional review*). MK merupakan lembaga yang didirikan dan dibentuk untuk menyandang peran sebagai pengawal (*the guardian*) dan

pelindung (*the protector*) Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam Negara yang menganut paham demokrasi konstiusional (*constitutional democracy*). Dalam kedudukannya demikian itu, maka tidak dapat dihindarkan bahwa MK memainkan peranan yang penting dan bahkan secara hukum memiliki superioritas legal tertentu dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga dari cabang kekuasaan lain, seperti legislatif dan eksekutif.

Kewenangan menguji yang dimiliki dan dilaksanakan meliputi semua produk legislatif (*legislative acts*) yang merupakan perangkat hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam setiap sistem politik dibawah Undang-Undang Dasar. Kewenangan pengujian konstiusional semacam ini dipusatkan hanya pada satu-satunya lembaga yang diberikan kekuasaan khusus sebagai penafsir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of the constitution*) (Asshiddiqie, 2010).

Konsep pengujian konstiusional merupakan konsep yang lahir sebagai hasil dari perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang didasarkan atas ide-ide Negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan (*seperation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Pengujian konstiusional (*constitutional review*) memiliki dua tugas pokok yaitu (Palguna, 2013):

1. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Dalam hal ini, pengujian konstiusional dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan Negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan Negara lainnya;

2. Untuk melindungi setiap individu warga Negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga Negara sehingga merugikan hak-hak fundamental individu-individu tersebut yang dijamin oleh konstitusi.

SIMPULAN

Hak konstitusional warga negara Indonesia adalah hak-hak yang meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi, karena telah dijamin oleh UUD 1945 maka seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya.

Upaya perlindungan hak konstitusional dilakukan melalui proses pembentukan undang-undang, agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dan tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan tata negara kepada MK untuk melakukan pengujian undang-undang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan UUD maupun mengenai materi ayat, pasal dan/atau bagian suatu undang-undang sebagai bentuk perlindungan hak-hak Konstitusional warga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402.

Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 413–436.

Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta. Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. (2006). *Mahkamah konstitusi: Memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ence, Iriyanto A. Baso. (2008). *Negara hukum dan hak uji konstitusionalitas mahkamah konstitusi*, Ed 1. Bandung: PT. Alumnus.

Gaffar, J. M. (2016). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1–32.

Munte, H., Nasution, M., Tarigan, P., & Sikumbang, J. (2017). Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panwas Kota Pematangsi. *USU Law Journal*, 5(1), 164984.

Ni'matul Huda, I. N. (2017). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Edisi Pertama, Kencana, Jakarta*.

Palguna, I Dewa Gede. (2010). Constitutional question: Latar belakang dan praktik di negara lain serta kemungkinan penerapannya di indonesia. *Jurnal Hukum*, 17(1), 3.

Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161–174.

Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159–176.

Siahaan, Maruarar. (2011). *Hukum acara mahkamah konstitusi republik indonesia*, Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika

Sihombing, E. N. A. M. (2018). *Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Constitutional Complaint*.

Soekanto, S. (2003). *Metode penelitian hukum*.

Wicaksono, D. A., & Nurbaningsih, E. (2020). RATIO LEGIS PENETAPAN PEMBAYAR PAJAK (TAXPAYER) SEBAGAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 461–494